BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki dua dekade terakhir, dunia pendidikan tidak bisa lagi dipisahkan dari arus besar digitalisasi yang melanda hampir seluruh sektor kehidupan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara lembaga-lembaga pendidikan menjalankan fungsinya, mulai dari administrasi, proses belajar mengajar, hingga evaluasi mutu. Teknologi yang dahulu hanya dipandang sebagai pelengkap kini berubah menjadi tulang punggung operasional pendidikan modern. Perubahan ini memaksa setiap lembaga, baik negeri maupun swasta, untuk menyesuaikan diri agar tetap relevan, efisien, dan mampu memberikan layanan yang transparan kepada masyarakat.[1]

Salah satu konsekuensi langsung dari transformasi tersebut adalah perubahan cara pengelolaan data pendidikan. Pada masa lalu, data sekolah, data guru, maupun data siswa biasanya tersimpan secara manual di masing-masing lembaga, terpisah satu sama lain, dan sulit untuk diakses secara cepat oleh pihak yang membutuhkan. Pola seperti ini jelas tidak lagi memadai di era ketika kebijakan publik dituntut untuk berbasis bukti dan data yang akurat. Data yang belum terintegrasi hanya akan menghasilkan informasi yang terlambat, tidak konsisten, dan rentan terhadap kesalahan, sehingga berpotensi mengganggu proses perencanaan maupun pengambilan keputusan di tingkat yang lebih tinggi.[2]

Di tengah kebutuhan dan tuntutan akan data yang berbasis digital, hadirlah *Education Management Information System* atau yang lebih dikenal dengan singkatan EMIS. Secara sederhana, EMIS dapat dipahami sebagai sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang khusus untuk menghimpun, menyimpan, mengolah, dan menyajikan data pendidikan secara sistematis dan terintegrasi. Kehadiran sistem semacam ini memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan, baik di tingkat satuan pendidikan, daerah, maupun pusat, untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi pendidikan secara real-time. EMIS pun perlahan bergeser fungsi, dari sekadar alat pencatatan administratif menjadi instrumen

[1] Budi Murtiyasa, "Pendayagunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan," 2017. Hal. 2-3
[2] Abdul Jalil, "Transformasi Digital Administrasi Sekolah: Strategi Inovatif Menuju Layanan Pendidikan Modern," *Sipakatau: Jurnal Pendidikan Islam*, 2026.hal. 3-4.

strategis yang mendukung perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan pendidikan secara berkelanjutan.[3]

Lebih jauh lagi, keberadaan EMIS sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari semangat global menuju tata kelola pemerintahan yang berbasis data atau yang sering disebut *data-driven policy*. Melalui sistem semacam ini, pemerintah dapat memantau perkembangan sektor pendidikan secara lebih komprehensif, mendeteksi berbagai persoalan yang muncul di lapangan sejak dini, sekaligus merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Tuntutan global akan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pengelolaan sektor publik turut menjadi pendorong utama mengapa hampir setiap negara, termasuk Indonesia, berlomba membangun sistem informasi pendidikan yang andal.[4]

Di Indonesia sendiri, urusan pengelolaan data pendidikan keagamaan menjadi tanggung jawab Kementerian Agama Republik Indonesia. Berbeda dengan Kementerian Pendidikan yang menaungi sekolah-sekolah umum, Kementerian Agama harus menangani satuan pendidikan yang jauh lebih beragam bentuknya, mulai dari madrasah, pondok pesantren, hingga perguruan tinggi keagamaan Islam yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Keragaman bentuk kelembagaan inilah yang kemudian menuntut adanya satu sistem yang mampu merangkum seluruh data tersebut dalam satu wadah, dan EMIS hadir untuk menjawab kebutuhan itu sebagai basis data nasional bagi perencanaan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan pendidikan keagamaan.[5]

Jika ditelusuri ke belakang, EMIS sudah mulai diperkenalkan di lingkungan Kementerian Agama sejak sekitar pertengahan dekade 1990-an. Pada masa-masa awal kemunculannya, sistem ini masih sangat sederhana, lebih banyak digunakan untuk mengumpulkan data administratif secara manual dan belum terhubung satu sama lain. Barulah seiring berjalannya waktu, terutama setelah teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat, EMIS mulai bertransformasi menjadi sistem digital yang lebih terintegrasi. Perubahan ini bukan hanya soal teknologi semata, melainkan juga menyangkut perluasan jenis data yang

[3] Yuli Tri Handayani, "Pemanfaatan Education Management Information System (EMIS) Dalam Sistem Pelaporan Lembaga Pendidikan Kementerian Agama Kabupaten Tuban" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).hal. 20-24.

[4]Richard Heeks, *Information and Communication Technology for Development* (London: Routledge, 2002).

[5]Kementerian Agama Republik Indonesia, "Pedoman Pengelolaan EMIS Pendidikan Islam" (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010).

dikumpulkan serta semakin pentingnya peran EMIS sebagai dasar pengambilan kebijakan di lingkungan Kementerian Agama.[6]

Sayangnya, perjalanan panjang EMIS tersebut tidak selalu berjalan mulus. Dalam praktiknya, implementasi sistem ini di lapangan masih sering menghadapi berbagai kendala yang tidak sederhana. Di beberapa daerah, infrastruktur teknologi masih jauh dari memadai, sementara sumber daya manusia yang bertugas mengelola sistem belum semuanya memiliki kemampuan teknis yang cukup. Belum lagi soal konsistensi pembaruan data yang sering terlambat atau bahkan tidak dilakukan sama sekali. Ditambah lagi, perubahan kebijakan dan pengembangan sistem yang terus-menerus terjadi membuat para pelaksana di lapangan harus terus beradaptasi, sesuatu yang tidak selalu mudah dilakukan dengan cepat. Akibatnya, muncul jurang yang cukup lebar antara sistem yang dirancang secara ideal di tingkat pusat dengan kondisi nyata yang dihadapi di lapangan.[7]

Persoalan-persoalan ini sebenarnya mengisyaratkan satu hal penting, yaitu bahwa keberhasilan sebuah sistem informasi seperti EMIS tidak cukup hanya diukur dari segi kecanggihan teknologinya saja. Faktor kelembagaan, arah kebijakan, hingga kesiapan sumber daya manusia ternyata memegang peranan yang sama pentingnya. Tidak sedikit kasus di mana data yang tersimpan dalam sistem belum benar-benar menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan, dan jika hal ini terus dibiarkan, tentu akan berdampak pada kualitas kebijakan yang diambil. Padahal, EMIS semestinya menjadi pijakan utama bagi perumusan kebijakan pendidikan yang akurat dan berbasis bukti, bukan sekadar pelengkap administratif.[8]

Persoalan lain yang juga tidak kalah penting adalah minimnya kajian yang melihat EMIS dari sudut pandang sejarah. Sejauh ini, sebagian besar penelitian tentang EMIS lebih banyak berbicara soal aspek teknis dan evaluatif, misalnya seberapa efektif sistem ini berjalan atau apa saja kendala operasionalnya dalam jangka pendek. Sementara itu, kajian yang menelaah bagaimana EMIS itu sendiri lahir, berkembang, dan berubah dari waktu ke waktu, khususnya dalam rentang waktu yang cukup panjang, masih sangat jarang ditemukan. Padahal, dengan melihat sejarahnya, kita justru bisa memahami secara lebih utuh bagaimana perubahan

[6]Ibid.

[7] Fifi Fajri Romdoniyah, "Implementasi Kebijakan Education Management Information System (EMIS)," *Jurnal Tahsinia* 5, no. 1 (2024). hlm. 55–60.

[8] Yusri, Ahmad Fauzi, and Jumaruddin, "Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam Berbasis Education Management Information System (EMIS)," 2024. hlm. 7–10.

kebijakan, kemajuan teknologi, dan dinamika kelembagaan saling memengaruhi satu sama lain dalam membentuk wajah EMIS yang ada saat ini.[9]

Kajian-kajian sebelumnya cenderung bersifat lokal, jangka pendek, dan lebih menitikberatkan pada aspek teknis-evaluatif implementasi EMIS di satu wilayah tertentu. Belum ada yang secara khusus mencoba merekonstruksi perjalanan EMIS secara historis di tingkat nasional sejak awal kemunculannya hingga mencapai bentuknya yang sekarang. Di sinilah letak kekosongan atau *research gap* yang ingin diisi melalui penelitian ini, yaitu sebuah kajian yang tidak hanya melihat EMIS sebagai sistem teknis, tetapi juga sebagai produk dari proses sejarah panjang yang melibatkan kebijakan, kelembagaan, dan dinamika implementasi yang saling berkaitan dari satu periode ke periode berikutnya.

Kekosongan tersebut menjadi alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian sejarah pendidikan Islam di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan sejarah kebijakan dan kelembagaan di lingkungan Kementerian Agama. Selama ini, kajian sejarah pendidikan Islam lebih banyak berbicara soal lembaga, tokoh, atau kebijakan pendidikan secara umum, sementara sisi infrastruktur informasi seperti EMIS yang sebenarnya menjadi tulang punggung pengambilan kebijakan justru belum banyak disentuh. Dengan merekonstruksi perjalanan EMIS sejak tahun 1994 hingga 2022, maka diharapkan dapat menghubungkan titik-titik penting dalam sejarah perkembangannya, mulai dari awal kemuculan EMIS yang masih sederhana, proses transformasinya menjadi sistem digital, hingga dinamika kebijakan yang menyertainya.[10]

Selain itu, penelitian ini juga memiliki urgensi praktis yang tidak kalah penting. Dengan memahami bagaimana EMIS berkembang dari waktu ke waktu, termasuk faktor-faktor apa saja yang membuat implementasinya berhasil di satu masa namun terkendala di masa lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi para pemangku kebijakan di Kementerian Agama dalam mengembangkan EMIS ke arah yang lebih baik. Pemahaman atas pengalaman masa lalu, baik keberhasilan maupun kegagalannya, tentu akan sangat berguna sebagai bahan refleksi untuk merancang kebijakan pengelolaan data pendidikan

[9] Handayani, "Pemanfaatan Education Management Information System (EMIS) Dalam Sistem Pelaporan Lembaga Pendidikan Kementerian Agama Kabupaten Tuban." hlm. 20–25.
[10] George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 1.

yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus lebih siap menghadapi tantangan ke depan.[11]

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan sejarah yang dipadukan dengan kerangka analisis kebijakan publik dari George C. Edwards III, sehingga mampu menjelaskan tidak hanya kronologi peristiwa, tetapi juga bagaimana variabel-variabel seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi mempengaruhi keberhasilan maupun kendala implementasi EMIS dari masa ke masa. Pendekatan gabungan semacam ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dibandingkan kajian-kajian sebelumnya yang cenderung berdiri sendiri-sendiri, baik dari sisi historis maupun dari sisi kebijakannya saja.[12]

Atas dasar pertimbangan tersebut, penelitian dengan judul "Melacak Jejak Hubungan Sejarah Perkembangan dan Implementasi *Education Management Information System* (EMIS) di Kementerian Agama (1994–2022)" menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk merekonstruksi sejarah perkembangan EMIS secara kronologis, tetapi juga untuk menganalisis keterkaitan antara kebijakan, implementasi, dan dinamika kelembagaan yang menyertainya sepanjang periode tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna, baik bagi pengembangan keilmuan sejarah pendidikan Islam maupun bagi upaya perbaikan tata kelola data pendidikan keagamaan di Indonesia ke depannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas sebagai tindak lanjut penelitian ini diperlukan batas masalah yang dibutuhkan, yaitu:

1. Bagaimana kondisi perkembangan pengelolaan data pendidikan sebelum ada *Education Management Information System* (EMIS) di Kementerian Agama Republik Indonesia ?
2. Bagaimana sejarah dan perkembangan implementasi EMIS dalam pengelolaan data pendidikan keagamaan di Kementerian Agama dari tahun 1994-2022?

[11]Ibid., hlm. 10.

[12]John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas sebagai tindak lanjut penelitian ini diperlukan batas masalah yang dibutuhkan, yaitu:

1. Untuk merekonstruksi sejarah dan menganalisis perkembangan pengelolaan data pendidikan di Indonesia dari sebelum dibentuknya *Education Management Information System* (EMIS).
2. Untuk menganalisis implementasi EMIS dalam pengelolaan data pendidikan keagamaan di Kementerian Agama serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kendalanya.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka adalah tinjauan yang dilakukan terhadap literatur yang relevan dengan penelitian. Hal ini mencakup penelaahan sumber primer, sekunder, dan literatur lain yang mendukung penelitian serta membantu memahami perkembangan teori atau konsep.[13] Penelusuran dari berbagai literatur terkait topik dilakukan penulis dengan tujuan melihat adanya perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Dalam penyusunan Proposal Rencana Penelitian, penulis telah mendapatkan beberapa referensi tulisan yang memiliki lingkup penelitian yang sama.

1. *Yusri, Ahmad Fauzi, dan Jumaruddin. (2024). "Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam Berbasis Education Management Information System (EMIS)."* Perbedaan utama antara kajian ini dan penelitian Yusri dkk. (2024) yang berjudul "Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam Berbasis Education Management Information System (EMIS)" terletak pada metode dan kedalaman analisis historis. Penelitian Yusri dkk. menggunakan metode library research (studi kepustakaan) yang mengkaji berbagai literatur tentang implementasi EMIS tanpa melakukan pengumpulan data primer di lapangan, sehingga temuannya bersifat deskriptif-normatif. Meskipun cakupan literaturnya luas dan mampu memberikan gambaran umum mengenai validitas data serta keterbatasan pembaruan informasi dalam sistem EMIS, penelitian tersebut tidak menggali realitas empiris dari pelaksana di

[13] M Nadzir, Metode penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).

lapangan. Penelitian ini, dengan menggunakan metode sejarah dan sumber primer berupa wawancara langsung dengan pejabat serta pengelola EMIS di Kementerian Agama pusat, secara khusus merekonstruksi perkembangan historis EMIS dalam kurun waktu 1994–2022, sebuah dimensi periodisasi yang sama sekali tidak dibahas oleh penelitian Yusri dkk. Selain itu, jika studi terdahulu menyoroti aspek evaluatif terhadap efektivitas sistem informasi pendidikan Islam secara umum, penelitian ini menggunakan kerangka teori George C. Edwards III untuk menganalisis secara mendalam bagaimana empat variabel implementasi kebijakan—komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi—memengaruhi dinamika penerapan EMIS dari fase awal hingga era transformasi digital EMIS 4.0.

2. *Romdoniyah, F. F., Ibrahim, T., dan Arifudin, O. (2024). "Implementasi Kebijakan Education Management Information System (EMIS) Di Seksi PD. Pontren Pada Kemenag Kota Bandung."* Perbedaan utama antara kajian ini dan penelitian Romdoniyah dkk. (2024) yang berjudul "Implementasi Kebijakan Education Management Information System (EMIS) Di Seksi PD. Pontren Pada Kemenag Kota Bandung" terletak pada cakupan wilayah, perspektif analisis, dan rentang waktu kajian. Penelitian Romdoniyah dkk. menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada satu unit kerja di tingkat kota, yaitu Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Kota Bandung, dan berhasil mengidentifikasi permasalahan implementasi seperti kurangnya kesadaran lembaga dalam melakukan entry data, persepsi keliru terhadap urgensi EMIS, keterbatasan SDM dan perangkat teknologi, serta kesulitan koordinasi antar lembaga. Temuan-temuan tersebut sejalan dengan variabel teori Edwards III, khususnya aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun, penelitian tersebut hanya menangkap kondisi implementasi pada satu titik waktu tanpa dimensi sejarah. Penelitian ini berbeda karena bersifat makro-historis, merekonstruksi perkembangan EMIS secara nasional di tingkat pusat Kementerian Agama sepanjang hampir tiga dekade (1994–2022), menggunakan metode sejarah (heuristik, kritik, interpretasi, historiografi) dengan sumber primer berupa dokumen resmi dan wawancara dengan para pejabat serta pengelola EMIS di tingkat pusat. Dengan demikian, penelitian ini mampu menjelaskan bagaimana dinamika kebijakan, transformasi teknologi, dan perubahan kelembagaan saling memengaruhi dalam proses implementasi EMIS dari waktu ke waktu suatu aspek yang tidak tercakup dalam penelitian Romdoniyah dkk.

3. *Suastika, I K., Purwanto, A. J., dan Hariyadi, A. R. (2022). "Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Pendidikan Bintara Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Sekolah Polisi Negara Polda Bali."* Perbedaan utama antara kajian ini dan penelitian Suastika dkk. (2022) yang berjudul "Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Pendidikan Bintara Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Sekolah Polisi Negara Polda Bali" terletak pada objek kajian dan konteks kelembagaan, meskipun keduanya sama-sama menggunakan teori George C. Edwards III sebagai kerangka analisis. Penelitian Suastika dkk. secara sistematis menerapkan empat variabel Edwards III—komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi—untuk mengkaji implementasi kebijakan pendidikan di institusi kepolisian, dan menemukan bahwa keempat variabel tersebut berjalan dengan baik di SPN Polda Bali. Keunggulan penelitian ini terletak pada penggunaan teori Edwards III yang komprehensif dan terstruktur, sehingga menjadi rujukan metodologis yang relevan. Namun, konteks institusi kepolisian sangat berbeda dengan konteks pendidikan keagamaan di Kementerian Agama, sehingga temuan tidak dapat langsung ditransfer. Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis yang sama tetapi diterapkan pada objek yang berbeda, yaitu implementasi EMIS sebagai kebijakan pengelolaan data pendidikan Islam, dengan tambahan perspektif diakronik-historis yang merekonstruksi dinamika perubahan kebijakan sepanjang 1994–2022. Jika Suastika dkk. bersifat evaluatif-sinkronik pada satu titik waktu, penelitian ini menelusuri bagaimana faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berevolusi seiring perkembangan EMIS dari sistem manual hingga EMIS 4.0.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

4. *Sina, R. dan Mahsyar, A. (2020). "Penerapan Education Management Information System (EMIS) di Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Pada Kantor Kementerian Agama Kota Makassar."* Perbedaan utama antara kajian ini dan penelitian Sina dan Mahsyar (2020) yang berjudul "Penerapan Education Management Information System (EMIS) di Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Pada Kantor Kementerian Agama Kota Makassar" terletak pada skala analisis, dimensi temporal, dan kerangka teoritis yang digunakan. Penelitian Sina dan Mahsyar menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus di satu wilayah (Kota Makassar) dan berhasil mengidentifikasi kendala-kendala implementasi EMIS yang sangat relevan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya kapasitas SDM dalam mengoperasikan sistem, serta belum optimalnya koordinasi antara kantor Kemenag dengan lembaga pendidikan keagamaan di lapangan. Temuan-temuan ini sejalan dengan

variabel-variabel teori Edwards III, khususnya sumber daya, komunikasi, dan struktur birokrasi, meskipun penelitian Sina dan Mahsyar tidak menggunakan teori Edwards III secara eksplisit sebagai kerangka analisis. Keunggulan penelitian tersebut terletak pada kemampuannya menggali kondisi riil implementasi EMIS di tingkat daerah melalui data primer. Namun, cakupannya terbatas pada satu kota tanpa perspektif historis, sehingga tidak mampu menjelaskan bagaimana dinamika kebijakan nasional dan perkembangan teknologi memengaruhi implementasi EMIS dari waktu ke waktu. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan merekonstruksi secara historis perkembangan EMIS di tingkat nasional sepanjang 1994–2022, menggunakan teori Edwards III secara eksplisit, dan mengandalkan sumber primer dari pejabat serta pengelola EMIS di Kementerian Agama pusat.

E. Metode Penelitian

a. Heuristik

Heuristik adalah tahap awal dalam metode penelitian sejarah yang berfokus pada pencarian dan pengumpulan sumber-sumber sejarah, baik berupa sumber primer maupun sekunder. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan data atau fakta sejarah yang relevan dan autentik sebagai bahan utama analisis.[14] Yang menjadi tugas utama dari seorang peneliti sejarah adalah dengan menemukan sumber primer agar kebenaran penelitiannya tidak diragukan lagi.

Menurut Notosusanto heuristik berasal dari bahasa Yunani heuriskein, yang artinya sama dengan to find yang berarti tidak hanya menemukan, tetapi mencari dulu. Pada tahapan ini kegiatan diarahkan pada penjajakan, pencarian, dan pengumpulan sumber-sumber yang akan diteliti, baik berupa temuan, benda, ataupun sumber lisan.[15]

Dalam tahapan heuristik, penulis telah menemukan beberapa sumber yang berkaitan dengan judul penelitian. Baik itu sumber primer maupun sumber sekunder.

a) Sumber primer

Tulisan Portal Resmi

1) Portal Resmi Kementerian Agama yang terbit tanggal 3 November 2020 dengan judul

[14] Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).h.51

[15] Sulasaman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, ed. Beni Ahmad Saebani, Cetakan.1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).

berita "Setelah 20 Tahun, Kemenag Bangun Ulang Aplikasi Sistem Pendataan EMIS".

2) Portal Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama yang terbit tanggal 25 Februari 2021 dengan judul berita "Transformasi Digital Pendidikan Keagamaan, Kemenag Rilis Aplikasi EMIS 4.0".
3) Portal Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama yang terbit tanggal 5 Desember 2023 dengan judul berita "Seperempat Abad EMIS, Kemen ag Perkuat Perumusan Kebijakan Berbasis Data".

Sumber Lisan

1) Wawancara dengan Akrom, 42 tahun, selaku Ketua Sub Tim EMIS Ditjen Pendidikan Islam, mengelola teknis EMIS dan koordinasi operator sejak tahun 2015, wawancara pada 16 oktober 2025.
2) Wawancara dengan Faizal Azis, selaku pengelola EMIS Pesantren dan Pendidikan Agama Islam (PAI) di lingkungan Kementerian Agama RI, wawancara pada 15 Maret 2026.
3) Wawancara dengan Fadilah, selaku pengelola EMIS Pesantren dan Pendidikan Agama Islam (PAI) di lingkungan Kementerian Agama RI, wawancara pada 15 Maret 2026.
4) Wawancara dengan Neldawati, selaku pengelola EMIS Pesantren dan Pendidikan Agama Islam (PAI) di lingkungan Kementerian Agama RI, wawancara pada 15 Maret 2026.
5) Wawancara dengan Muhammad Rizky, selaku pengelola EMIS Pesantren dan Pendidikan Agama Islam (PAI) di lingkungan Kementerian Agama RI, wawancara pada 15 Maret 2026.
6) Wawancara dengan Irfan Bagus, selaku pengelola EMIS Pesantren dan Pendidikan Agama Islam (PAI) di lingkungan Kementerian Agama RI, wawancara pada 15 Maret 2026.
7) Wawancara dengan Mutiara Riftah, selaku pengelola EMIS Madrasah dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di lingkungan Kementerian Agama RI, wawancara pada 15 Maret 2026.
8) Wawancara dengan Maulana Rafly, selaku pengelola EMIS Madrasah dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di lingkungan Kementerian Agama RI,
9) Wawancara dengan Lutfiansyah, selaku pengelola EMIS Madrasah dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di lingkungan Kementerian Agama RI, wawancara pada 15 Maret 2026.
10) Wawancara dengan Salmah, selaku pengelola EMIS Madrasah dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di lingkungan Kementerian Agama RI, wawancara pada 15 Maret 2026.

11) Wawancara dengan Reza Fahlevi, selaku pengelola EMIS Madrasah dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di lingkungan Kementerian Agama RI, wawancara pada 15 Maret 2026.
12) Wawancara dengan Rudi Achmadi, selaku Tenaga Ahli/Konsultan EMIS di lingkungan Kementerian Agama RI, wawancara pada 15 Maret 2026.
13) Wawancara dengan Fathatin Laidia, selaku Ketua Tim Data, Sistem Informasi, dan Humas di lingkungan Kementerian Agama RI, wawancara pada 15 Maret 2026.
14) Wawancara dengan Azis Shaleh, selaku Ketua Subtim EMIS Pesantren dan Pendidikan Agama Islam (PAI) di lingkungan Kementerian Agama RI, wawancara pada 15 Maret 2026.
15) Wawancara dengan Dodi Irawan Syarif, selaku Ketua Subtim EMIS Madrasah dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di lingkungan Kementerian Agama RI, wawancara pada 15 Maret 2026

Dokumen

1) Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022.

b) Sumber Sekunder Buku

1) Rusdiana, A. (2019). *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Cetakan Pertama. Bandung: PPLP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
2) Tim UIN Alauddin Makassar. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan: Transformasi Organisasi, Pengelolaan Sumber Daya, dan Aplikasi Sistem*. Makassar: Repositori UIN Alauddin Makassar.
3) Adiyana Adam, Dra., M.Pd. (dkk) (2024). *Sistem Informasi Manajemen*. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam.

b. Kritik

Setelah mengumpulkan sumber, penulis harus melakukan kritik terhadap keaslian dan kredibilitas sumber tersebut. Ini mencakup verifikasi untuk memastikan bahwa dokumen yang ditemukan adalah otentik dan dapat dipercaya. Kritik sumber dilakukan untuk menilai keandalan dan kreadibilitas data yang dikumpulkan. Terdapat dua jenis kritik yang perlu diterapkan:

a) **Kritik Ekstern**

Kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keabsahan dan autensitas sumber. Kritik terhadap autensitas sumber tersebut misalnya dengan melakukan pengecekan tanggal penerbitan dokumen, pengecekan bahan yang berupa kertas atau tinta apakah cocok dengan masa

di mana bahan semacam itu biasa digunakan atau diproduksi. Memastikan suatu sumber apakah termasuk sumber asli atau salinan.

Sumber Tertulis Portal Resmi

Portal Resmi Kementerian Agama (3 November 2020)

1) **Judul:** *"Setelah 20 Tahun, Kemenag Bangun Ulang Aplikasi Sistem Pendataan EMIS"*
2) **Kritik:** Sumber ini berasal dari portal resmi Kementerian Agama Republik Indonesia sehingga memiliki tingkat keaslian tinggi sebagai dokumen institusional. Namun, sebagai berita resmi pemerintah, terdapat potensi bias institusional yang cenderung menampilkan narasi positif terhadap kebijakan yang diambil. Informasi yang disajikan lebih bersifat deskriptif dan promosi kebijakan, bukan analisis kritis terhadap kelemahan sistem sebelumnya.
3) **Kontribusi:** Sangat penting sebagai sumber primer, tetapi perlu dibandingkan dengan sumber lain untuk menghindari bias pemerintah.

Portal Ditjen Pendidikan Islam (25 Februari 2021)

1) **Judul:** *"Transformasi Digital Pendidikan Keagamaan, Kemenag Rilis Aplikasi EMIS 4.0"*
2) **Kritik:** Sumber ini merupakan publikasi resmi dari Ditjen Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang memiliki otoritas langsung terhadap EMIS. Keasliannya dapat dipercaya, namun isi berita cenderung bersifat normatif dan menonjolkan keberhasilan inovasi EMIS 4.0 tanpa mengulas secara mendalam kendala implementasi di lapangan.
3) **Bias:** Bias kebijakan (policy bias), yaitu menampilkan keberhasilan program pemerintah tanpa kritik internal.
4) **Kontribusi:** Memberikan informasi penting terkait fase transformasi EMIS, tetapi perlu dilengkapi dengan data evaluatif dari penelitian independen.

Portal Ditjen Pendidikan Islam (5 Desember 2023)

1) **Judul:** *"Seperempat Abad EMIS, Kemenag Perkuat Perumusan Kebijakan Berbasis Data"*
2) **Kritik:** Sebagai sumber terbaru, tulisan ini memiliki nilai aktualitas tinggi dan relevan untuk melihat perkembangan EMIS dalam jangka panjang. Namun, karena berasal dari lembaga resmi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, terdapat kecenderungan narasi institusional yang menekankan keberhasilan dan capaian tanpa mengungkap secara kritis permasalahan historis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

yang terjadi. Selain itu, tidak semua data yang disajikan dilengkapi dengan rujukan metodologis yang jelas.

3) **Bias:** Narasi selektif (selective narrative), menonjolkan aspek positif perjalanan EMIS.
4) **Kontribusi:** Penting sebagai sumber primer untuk periodisasi EMIS, tetapi perlu dikritisi dan dikombinasikan dengan wawancara serta sumber akademik.

Sumber Buku

Rusdiana, *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan* (2019)

1) **Kritik:** Buku ini merupakan karya akademik yang diterbitkan oleh lembaga internal kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung, sehingga secara umum kredibel dalam konteks keilmuan manajemen pendidikan. Namun, sebagai buku teks, sumber ini lebih bersifat konseptual dan umum, tidak secara spesifik membahas EMIS di Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, referensi yang digunakan cenderung sekunder, sehingga perlu diverifikasi dengan sumber primer atau dokumen resmi untuk memperkuat validitas historis.
2) **Kontribusi:** Memberikan landasan teoritis yang kuat tentang sistem informasi manajemen pendidikan, tetapi perlu dilengkapi dengan data empiris dan historis yang lebih spesifik.

Tim UIN Alauddin Makassar, *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*

1) **Kritik:** Buku ini berasal dari repositori internal UIN Alauddin Makassar, sehingga perlu diperhatikan statusnya (apakah telah melalui proses peer-review atau tidak). Keaslian dokumen dapat dipercaya, tetapi kredibilitas ilmiahnya bergantung pada proses akademik yang melatarbelakanginya. Selain itu, pembahasan masih bersifat umum dan tidak secara langsung menyinggung perkembangan EMIS secara historis.
2) **Bias:** Cenderung normatif dan konseptual, belum menyentuh realitas implementasi di lapangan.
3) **Kontribusi:** Berguna sebagai kerangka konseptual, tetapi tidak cukup sebagai sumber utama dalam kajian historis EMIS.

Adiyana Adam dkk., *Sistem Informasi Manajemen* (2024)

1) **Kritik:** Sebagai buku terbaru, sumber ini memiliki keunggulan dari segi aktualitas. Namun, karena merupakan produk internal program studi, perlu dikaji lebih lanjut tingkat validitas akademiknya (apakah telah diterbitkan secara nasional atau hanya

sebagai bahan ajar). Selain itu, fokus pembahasan bersifat umum dan tidak secara spesifik mengulas EMIS atau konteks Kementerian Agama Republik Indonesia.

2) **Bias:** Potensi bias akademik lokal (berorientasi pada kebutuhan pembelajaran internal).
3) **Kontribusi:** Memberikan perspektif terbaru terkait sistem informasi, tetapi tetap membutuhkan penguatan dari sumber primer dan penelitian lapangan.

Sumber Dokumen

Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 (Ditandatangani oleh Yaqut Cholil Qoumas)

1) **Kritik:** Dokumen ini merupakan sumber resmi negara yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, sehingga memiliki tingkat keaslian (otentisitas) yang sangat tinggi dan dapat dikategorikan sebagai sumber primer. Keabsahan dokumen diperkuat dengan adanya nomor keputusan, format baku peraturan, serta tanda tangan pejabat berwenang, yaitu Menteri Agama. Namun, sebagai produk kebijakan pemerintah, dokumen ini bersifat normatif dan legal-formal, sehingga lebih merepresentasikan kehendak dan arah kebijakan institusi daripada menggambarkan kondisi empiris di lapangan.
2) **Bias:** Mengandung bias institusional karena disusun untuk menetapkan dan melegitimasi kebijakan tertentu, sehingga tidak memuat kritik, kendala, atau dinamika implementasi secara menyeluruh.
3) **Kontribusi:** Sangat penting sebagai landasan hukum dan pijakan analisis kebijakan dalam penelitian, tetapi perlu dilengkapi dengan sumber lain seperti wawancara, laporan implementasi, dan kajian akademik agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

b) **Kritik Intern**

Kritik intern dilakukan untuk menilai kelayakan atau kredibilitas sumber. Kredibilitas sumber biasanya mengacu pada kemampuan sumber untuk mengungkap kebenaran suatu peristiwa Sejarah.

Sumber Lisan

Wawancara dengan Pejabat dan Pengelola EMIS di Lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia (2025–2026)

Isi : Wawancara ini memuat informasi mengenai sejarah perkembangan, implementasi, serta

dinamika pengelolaan Education Management Information System (EMIS) dari berbagai level kelembagaan, mulai dari pejabat struktural hingga tim teknis pelaksana. Informasi yang diperoleh sangat relevan karena berasal dari pelaku langsung (first-hand informants) yang terlibat dalam proses pengembangan dan pengelolaan EMIS, baik pada level kebijakan maupun operasional. Dengan demikian, sumber ini memiliki nilai penting dalam merekonstruksi proses historis serta memahami praktik implementasi EMIS di lapangan.

Kredibilitas:

1) Informasi dari para pengelola teknis (seperti Faizal Azis, Mutiara Riftah, dan lainnya) juga dapat dipercaya dalam konteks operasional, seperti mekanisme penginputan data, kendala teknis, serta implementasi sistem di lapangan.
2) Namun, kredibilitas menjadi terbatas ketika informan memberikan interpretasi yang melampaui pengalaman langsungnya, terutama terkait periode awal EMIS (1990-an) atau kebijakan lintas unit yang tidak berada dalam lingkup tugasnya.

Keterbatasan:

1) **Subjektivitas narasumber:** Informan cenderung menyampaikan pengalaman berdasarkan sudut pandang masing-masing, sehingga terdapat kemungkinan penonjolan keberhasilan program dan minimnya pengungkapan kegagalan atau kendala internal secara terbuka.

2) **Bias institusional:** Karena seluruh narasumber berasal dari lingkungan Kementerian Agama, terdapat kecenderungan untuk mempertahankan citra positif institusi, terutama dalam menggambarkan keberhasilan implementasi EMIS.

3) **Keterbatasan perspektif historis:** Sebagian besar informan hanya terlibat dalam periode tertentu (khususnya setelah 2010-an), sehingga informasi mengenai fase awal EMIS (1994–2000-an) cenderung bersifat sekunder atau berdasarkan ingatan kolektif, bukan pengalaman langsung.

4) **Ketergantungan pada ingatan (memory bias):** Wawancara yang mengandalkan ingatan berpotensi mengandung distorsi, terutama dalam penentuan kronologi, detail peristiwa, atau interpretasi terhadap kebijakan masa lalu.

Sumber Dokumen

SUNAN GUNUNG DJATI

Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 (Ditandatangani oleh Yaqut Cholil Qoumas)

Isi: Dokumen ini memuat ketetapan resmi terkait kebijakan di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan data, sistem informasi, atau kelembagaan yang mendukung implementasi EMIS. Isi dokumen bersifat normatif dan preskriptif, yang menjelaskan struktur, tugas, serta arah kebijakan yang harus dijalankan oleh unit kerja terkait. Relevansi dokumen ini sangat tinggi karena menjadi landasan formal dalam memahami kerangka kebijakan dan legitimasi kelembagaan dalam pengembangan serta implementasi EMIS, khususnya pada fase transformasi digital terbaru.

Kredibilitas:

1) Dokumen ini memiliki tingkat kredibilitas tinggi karena merupakan produk hukum resmi negara yang dikeluarkan oleh Menteri Agama.
2) Informasi yang berkaitan dengan struktur organisasi, tugas, dan kebijakan dapat dipercaya sebagai representasi resmi dari keputusan pemerintah.
3) Namun, kredibilitasnya terbatas pada aspek normatif (apa yang seharusnya dilakukan), bukan pada aspek empiris (apa yang benar-benar terjadi di lapangan).

Keterbatasan:

1) **Bersifat normatif-formal:** Dokumen hanya memuat ketentuan dan kebijakan tanpa menjelaskan implementasi riil, sehingga tidak menggambarkan secara langsung efektivitas EMIS di lapangan.
2) **Tidak memuat dinamika proses:** Latar belakang pengambilan keputusan, perdebatan internal, serta kendala yang melatarbelakangi kebijakan tidak dijelaskan secara rinci.
3) **Potensi bias kebijakan:** Isi dokumen cenderung merepresentasikan kepentingan dan arah kebijakan pemerintah, sehingga tidak memuat kritik atau evaluasi terhadap sistem yang telah berjalan sebelumnya.
4) **Keterbatasan kontekstual:** Tanpa didukung sumber lain, dokumen ini tidak cukup untuk menjelaskan hubungan antara kebijakan dan realitas implementasi EMIS di berbagai daerah.

c. Interpretasi

Interpretasi merupakan proses memberikan makna terhadap data, fakta, atau peristiwa berdasarkan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian. Dalam konteks ini, interpretasi tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga berupaya memahami hubungan antara kebijakan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan sebagai alat analisis untuk menjelaskan dinamika penerapan Education Management Information System (EMIS) di lingkungan Kementerian Agama.[16]

Penelitian ini mengadopsi teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III dalam bukunya *Implementing Public Policy* (1980) sebagai landasan untuk menganalisis bagaimana kebijakan EMIS dijalankan dari tingkat pusat hingga daerah.[17] Edwards menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan publik, karena keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusannya, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan di lapangan.

Dalam bukunya, Edwards menyatakan bahwa:

> ***"Policy implementation is the stage of the policy process between the establishment of a policy—such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision—and the consequences of the policy for the people whom it affects."***[18]

Artinya, implementasi kebijakan adalah tahap yang menghubungkan antara penetapan kebijakan dengan dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan yang baik tidak akan menghasilkan hasil yang optimal tanpa implementasi yang efektif.

Lebih lanjut, Edwards menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Ia menyatakan bahwa:

> ***"The four critical factors or conditions for successful policy implementation are communication, resources, dispositions, and bureaucratic structure."***[19]

Keempat faktor tersebut memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Komunikasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan disampaikan

[16] Endah Marendah Ratnaningtyas et al., *Research Ques Ons*, 2023.hlm.61-62
[17] George C Edward, "Implementasi Public Policy," *Congressional Quarterly Press*, 1980.hal.1
[18] *Ibid.*hal.1
[19] *Ibid.*hal.10

secara jelas dan konsisten kepada pelaksana. Sumber daya mencakup ketersediaan tenaga kerja, kemampuan teknis, dan fasilitas pendukung. Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Sementara itu, struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme organisasi, koordinasi, serta pembagian tugas dalam sistem pemerintahan.

Dalam konteks penelitian ini, teori Edwards III digunakan untuk menganalisis implementasi EMIS sebagai kebijakan publik di lingkungan Kementerian Agama. Komunikasi dapat dilihat dari proses sosialisasi EMIS kepada operator madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan lainnya. Sumber daya tercermin dalam kesiapan infrastruktur teknologi dan kualitas sumber daya manusia yang mengelola sistem. Disposisi terlihat dari sikap dan tingkat penerimaan pengguna terhadap EMIS. Sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan koordinasi antarunit dalam pengelolaan data pendidikan.

Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam implementasi EMIS. Selain itu, teori ini juga membantu menjelaskan kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika implementasi EMIS serta menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang.[20]

d. Historiografi

Historiografi merupakan tahap akhir dalam metode penelitian sejarah, yaitu kegiatan menyusun hasil penelusuran sumber, kritik sumber, dan interpretasi ke dalam tulisan sejarah yang runtut serta dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahap ini, penulis tidak hanya menyusun peristiwa berdasarkan urutan waktu, tetapi juga menjelaskan hubungan antara kondisi yang melatarbelakangi suatu perubahan, proses yang berlangsung, dan akibat yang ditimbulkannya. Hasil penelitian disajikan secara kronologis dan tematis dengan memperhatikan perkembangan kebijakan dan kelembagaan Kementerian Agama.

Dalam penelitian ini, penulisan sejarah diarahkan untuk menjawab dua rumusan masalah yang telah diperbarui. Pertama, bagaimana kondisi perkembangan pengelolaan data pendidikan sebelum hadirnya *Education Management Information System* (EMIS) di Kementerian Agama Republik Indonesia. Kedua, bagaimana sejarah dan perkembangan implementasi EMIS dalam pengelolaan data pendidikan keagamaan di Kementerian Agama pada 1994–2022. Kedua pertanyaan tersebut memiliki hubungan yang berurutan. Gambaran

[20] *Ibid.*hal.148

tentang pendataan sebelum EMIS diperlukan untuk memahami persoalan yang mendorong lahirnya sistem informasi, sedangkan pembahasan setelah 1994 memperlihatkan bagaimana upaya pembaruan itu dijalankan, mengalami perubahan, dan menghadapi kendala di lapangan. Narasi disusun dari dokumen resmi, statistik pendidikan, peraturan, literatur, dan hasil wawancara yang telah ditelaah melalui kritik sumber. Perbedaan keterangan tentang perintisan EMIS dibaca sesuai konteks masing-masing sumber.

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Latar belakang menjelaskan alasan pentingnya menelusuri sejarah pengelolaan data pendidikan keagamaan, tidak hanya dari sisi perkembangan teknologi, tetapi juga dalam hubungannya dengan kebutuhan administrasi dan penyusunan kebijakan pendidikan. Pada bab ini, penulis menjelaskan penggunaan metode sejarah melalui tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Teori implementasi kebijakan George C. Edwards III membantu analisis pelaksanaan EMIS, sementara kronologi tetap menjadi dasar penelitian sejarah.

Bab II berjudul "Kondisi Pengelolaan Data Pendidikan Keagamaan di Kementerian Agama Republik Indonesia Sebelum Hadirnya EMIS". Bab ini ditujukan untuk menjawab rumusan masalah pertama dengan menelusuri keadaan pengelolaan data sejak masa awal pembinaan pendidikan keagamaan setelah berdirinya Kementerian Agama hingga menjelang 1994. Pembahasan diawali dengan kondisi kelembagaan pendidikan keagamaan, terutama keragaman madrasah dan pesantren serta hubungannya dengan administrasi pemerintah. Selanjutnya diuraikan mekanisme pendataan yang masih menggunakan formulir cetak, pencatatan manual, dan penyampaian laporan secara berjenjang dari satuan pendidikan ke tingkat pusat. Bab ini juga membahas keterlambatan laporan, ketidaklengkapan dan ketidakseragaman data, keterbatasan petugas dan sarana, serta dampaknya terhadap perencanaan pendidikan. Bagian akhir menelusuri munculnya kebutuhan pembaruan sistem menjelang 1994 sebagai penghubung menuju pembahasan sejarah EMIS pada bab berikutnya.

Bab III berjudul "Sejarah dan Perkembangan Implementasi EMIS dalam Pengelolaan Data Pendidikan Keagamaan di Kementerian Agama Republik Indonesia (1994–2022)". Bab ini menjawab rumusan masalah kedua melalui penelusuran tahap demi tahap perkembangan EMIS. Pembahasan dibuka dengan kerangka analisis implementasi kebijakan George C. Edwards III, kemudian dilanjutkan dengan perintisan dan pembentukan awal EMIS dalam konteks proyek peningkatan mutu pendidikan madrasah pada 1994–2006. Periode berikutnya menguraikan perubahan teknologi serta cara kerja pendataan pada 2006–2020, mulai dari penggunaan Microsoft Excel, sistem semi-online, aplikasi desktop dengan sinkronisasi daring,

sampai penggunaan EMIS Online dan EMIS Feeder. Uraian dilanjutkan dengan transformasi EMIS 4.0 pada 2021 dan penguatan regulasi melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2022. Periodisasi tersebut menggambarkan perubahan bertahap yang tidak selalu seragam antardaerah.

Setelah menyajikan perkembangan secara kronologis, Bab III menganalisis pelaksanaan EMIS berdasarkan empat variabel Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut digunakan untuk membaca hubungan antara arahan kebijakan dari pusat, kesiapan petugas serta sarana pendataan, penerimaan satuan pendidikan terhadap kewajiban pelaporan, dan koordinasi antarunit pengelola. Bab ini selanjutnya menjelaskan pemanfaatan EMIS dalam pendataan madrasah, pesantren, pendidikan keagamaan nonformal, dan tenaga pendidik, serta menguraikan faktor pendukung, hambatan, dan pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman implementasinya. Dengan susunan tersebut, pembahasan tidak berhenti pada pergantian aplikasi, tetapi juga menunjukkan perubahan praktik administrasi pendidikan keagamaan dan keterbatasan pelaksanaannya hingga akhir 2022.

Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan berdasarkan dua rumusan masalah penelitian. Kesimpulan pertama merangkum ciri-ciri pendataan pendidikan keagamaan sebelum EMIS beserta persoalan yang menyebabkan munculnya kebutuhan sistem informasi yang lebih tertata. Kesimpulan kedua merangkum perkembangan implementasi EMIS sepanjang 1994–2022, perubahan mekanisme dan teknologi pendataan, penguatan kebijakan, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Pada bagian ini, penulis menegaskan batas periode penelitian: penerapan EMIS 4.0 dan terbitnya regulasi pada 2021–2022 menunjukkan arah pembaruan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh masalah integrasi dan kualitas data telah terselesaikan. Dengan demikian, historiografi penelitian ini diharapkan memberi gambaran sejarah yang saling berkaitan antara keadaan sebelum EMIS, perkembangan penerapannya, dan kedudukannya dalam pengelolaan data pendidikan keagamaan. Bagian akhir dilengkapi daftar sumber dan lampiran.